



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3370-3383

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Sakti, Kompetensi SDM, dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Rahmat<sup>1✉</sup>, Rina Maulina<sup>2</sup>

Universitas Teuku Umar

Email: [sinagarahmat16@gmail.com](mailto:sinagarahmat16@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor berikut—SAKTI, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Good Governance mempengaruhi keakuratan data laporan keuangan. Pesertanya meliputi seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) unit Meulaboh yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Sampel penelitian sebanyak 31 partisipan dipilih dengan menggunakan teknik non-probability sampling yang disebut dengan metode sampling jenuh. Dengan mengirimkan survei kepada masyarakat, kami dapat mengumpulkan data primer. Dengan menggunakan SPSS 23 sebagai alat analisis data, metode regresi linier berganda digunakan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa SAKTI dan Penerapan Good Governance tidak dapat dianggap sebagai variabel independen yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Namun, Kompetensi Sumber Daya Manusia terbukti berpengaruh signifikan terhadap keakuratan data laporan keuangan. Kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel SAKTI, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Good Governance, berdasarkan data hasil pengujian secara simultan. Terakhir, penelitian ini menyoroti lingkungan KPPN Meulaboh dan unsur-unsur yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci : *Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan, Pengaruh SAKTI*

## Abstract

The purpose of this research was to analyze how the following factors—SAKTI, Human Resources Competence, and the Implementation of Good Governance influence the accuracy of financial report data. Participants include all staff members of the National Treasury Service Office (KPPN) Meulaboh unit accountable for financial management. The research sample of 31 participants was chosen using a non-probability sampling technique called the saturated sampling method. By sending out surveys to people, we were able to collect primary data. Using SPSS 23 as a data analysis tool, the multiple linear regression method was employed. Partial testing results show that SAKTI and the Implementation of Good Governance cannot be considered independent variables influencing the quality of financial report information. However, it has been demonstrated that Human Resources Competence significantly impacts the accuracy of financial report data. The quality of financial report information is influenced by the variables SAKTI, Human Resources Competence, and the Implementation of Good Governance, according to data from simultaneous testing. Finally, this study sheds light on the KPPN Meulaboh environment and the elements that affect the quality of government financial reports.

*Keywords: Good Governance, Human Resources Competencies, Financial Reports, Influence of SAKTI*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik yang efektif, terbuka, dan akuntabel merupakan hal yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintah, khususnya bagi Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Jika kita ingin memastikan uang pembayar pajak dibelanjakan secara bijaksana dan legal, maka pengelolaan keuangan yang baik adalah suatu keharusan.

Laporan keuangan pemerintah dinilai berkualitas menurut Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan-laporan ini harus memenuhi empat kriteria utama: laporan tersebut harus relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dianggap berkualitas tinggi jika memberikan gambaran situasi yang benar dan terverifikasi tanpa adanya interpretasi atau kesalahan yang menyesatkan.

Melalui hasil monitoring yang dilakukan oleh KPPN Meulaboh, telah teridentifikasi bahwa masih terdapat beberapa satuan kerja yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Beberapa permasalahan yang mencuat mencakup ketidaklengkapannya pendetilan persediaan dan aset, ketidakselesaian rekonsiliasi pada aplikasi monsakti, serta ketidaksesuaian kode akun dengan persediaan atau aset. Menariknya, sebagian satuan kerja mengakui kesalahan dalam memilih kode barang, yang seharusnya menghasilkan aset, namun salah membuatnya menjadi persediaan.

Kendala-kendala tersebut dapat membawa dampak serius terhadap hasil akhir laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja di KPPN Meulaboh. Keberadaan aset dan persediaan yang tidak terdeteksi atau tidak disusun secara tepat dapat merugikan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan. Karena SAKTI merupakan sistem dasar untuk menangani dan mendokumentasikan transaksi moneter, maka pengaruhnya sangat relevan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sarana terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu (IFMIS). SAKTI merupakan sistem yang memfasilitasi integrasi seluruh aplikasi yang saat ini digunakan oleh unit kerja. Akuntabilitas, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran merupakan fungsi utama SAKTI. Untuk bertahan dalam bisnis dan memberikan layanan terbaik kepada klien mereka, baik organisasi publik maupun swasta harus mengadopsi strategi ICT (Nugroho, 2020).

Pada saat yang sama, praktik Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di lembaga pemerintah sangat penting untuk menghasilkan akuntansi yang andal dan akurat. "Keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya juga bergantung pada tingkat pengetahuannya; Efisiensi suatu organisasi akan meningkat ketika karyawannya mendapat informasi yang baik. Setiap penugasan akan terselesaikan dengan kemampuan terbaiknya jika pegawai menunjukkan karakteristik yang berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi (Wijayanti, 2021).

Mengesampingkan komponen aplikasi yang mempesona dan kompetensi SDM. Kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor penerapan Good Governance; Good Governance memberikan landasan moral untuk menciptakan suasana yang terbuka dan akuntabel. Sebagai bagian dari reformasinya, pemerintah federal mendelegasikan sebagian tugasnya kepada negara bagian dan kota melalui pembentukan otonomi daerah. Dampak signifikan dari otonomi daerah antara lain perubahan kebijakan federal mengenai pengelolaan keuangan daerah dan isu-isu lainnya (Sabrina, 2023).

Mutu berarti sejauh mana sesuatu itu baik atau sejauh mana sesuatu itu buruk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kapasitas informasi yang ditawarkan dalam laporan keuangan untuk dipahami dan divalidasi itulah yang dimaksud Defitri (2016) ketika berbicara tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan merupakan cerminan dari konsep kualitas laporan.

Kemampuan suatu perusahaan dalam melaporkan data keuangannya secara akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan salah satu tolak ukur kualitas pelaporan keuangannya (Yadiati, 2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) terdiri atas bagian-bagian utama sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2017:3), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa sebagian besar orang yang menggunakan laporan keuangan melakukannya untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik dengan mempelajari posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan dirancang untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna. Namun, pengguna mungkin memerlukan informasi tambahan di luar apa yang biasanya disertakan dalam laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Hal ini karena laporan keuangan terutama mencakup dampak moneter dari peristiwa masa lalu dan tidak wajib menyertakan rincian non-keuangan.

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan agar dapat dianggap berkualitas. Indikator penelitian untuk mengukur kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif laporan pemerintah daerah. Aspek-aspek yang relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami membentuk keempat ciri kualitatif ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Akrua (SAKTI), kompetensi SDM, dan Penerapan Good Governance di KPPN Meulaboh mempengaruhi keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing departemen. Salah satu cara untuk mengukur keterbukaan dan tanggung jawab suatu lembaga pemerintah adalah dengan melihat seberapa baik lembaga tersebut melaporkan keuangannya.

## METODE PENELITIAN

Peserta penelitian kuantitatif ini berjumlah 96 orang yang diambil dari gabungan seluruh pegawai pengelola keuangan pada satuan kerja KPPN Meulaboh. Dalam penelitian ini seluruh populasi diambil sampelnya dengan menggunakan metode non-probability sampling dan turunannya yaitu sampling jenuh. "Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan survei terhadap seluruh pegawai satuan kerja KPPN Meulaboh yang bertugas menyusun laporan keuangan. Sebanyak 96 kuesioner telah dikirimkan, 31 diantaranya telah dikembalikan dan siap untuk diuji. Ekstraksi hasil penelitian yang akurat dan bermakna dipastikan melalui penggunaan SPSS 23, sebuah program yang memastikan pemrosesan data terstruktur dan andal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian kualitas data melibatkan sejumlah asumsi klasik yang harus dipenuhi agar hasil analisis regresi linear dapat diandalkan. Tiga uji asumsi klasik yang umum digunakan adalah uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas

### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah variabel pengganggu atau residu dalam model regresi berdistribusi normal. Dalam konteks analisis regresi, penting untuk memastikan bahwa residual dari model tersebut memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik dianggap lebih andal jika residu mendekati distribusi normal.

Pengujian normalitas sering kali menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam pengambilan keputusan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, langkah yang umumnya diambil adalah membandingkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang telah ditentukan, biasanya pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0.05$ ).

Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ), misalnya lebih dari 0.05, maka tidak ada cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol. Oleh karena itu, dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa residual model regresi memiliki distribusi yang tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal.

Tabel 1. Hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		31	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.51779474	
Most Extreme Differences	Absolute	.140	
	Positive	.140	
	Negative	-.073	
Test Statistic		.140	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.123	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.		.117
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.108
		Upper Bound	.125

---

a. Test distribution is Normal.

---

b. Calculated from data.

---

c. Lilliefors Significance Correction.

---

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

---

*Sumber: Data diolah (2023)*

Pada Tabel 1, hasil uji Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,117. Nilai ini melebihi ambang signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal.

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Jenis uji asumsi kedua dalam analisis regresi adalah uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen dalam suatu model regresi linier ganda. Untuk memenuhi prasyarat dalam analisis regresi, sangat penting bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Pada uji multikolinearitas, evaluasi dilakukan dengan memperhatikan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dalam model regresi. Jika terdapat korelasi yang cukup tinggi antara variabel independen (lebih dari 0.09), ini dapat dianggap sebagai indikasi adanya masalah multikolinearitas dalam model.

Sebuah model regresi dianggap bebas dari masalah multikolinearitas jika memenuhi kriteria berikut:

- Nilai tolerance pada setiap variabel independen lebih besar dari 0.1.
- Nilai VIF pada setiap variabel independen lebih kecil dari 10.

Perhatian terhadap kedua indikator tersebut menjadi penting karena multikolinearitas dapat memengaruhi interpretasi koefisien regresi dan keakuratan prediksi model. Dengan menjaga nilai tolerance dan VIF dalam batas yang ditentukan, dapat dipastikan bahwa model regresi memiliki tingkat multikolinearitas yang dapat diterima untuk analisis yang lebih akurat dan andal.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	13.011	5.801		2.243	.033			
SAKTI (X1)	.107	.104	.164	1.035	.310	.842	1.188	
Kompetensi SDM (X2)	.348	.123	.523	2.826	.009	.616	1.624	
Penerapan Good Governance (X3)	.090	.191	.082	.470	.642	.692	1.445	

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Data diolah (2023)

Pada Tabel 2, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen.

#### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Setelah memastikan bahwa asumsi klasik terpenuhi, langkah berikutnya adalah melakukan uji analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS 23. Berikut merupakan hasil yang diperoleh:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	13.011	5.801		2.243	.033			
SAKTI (X1)	.107	.104	.164	1.035	.310	.842	1.188	
Kompetensi SDM (X2)	.348	.123	.523	2.826	.009	.616	1.624	

Penerapan							
Good	.090	.191	.082	.470	.642	.692	1.445
Governance (X3)							

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Data diolah (2023)

Dairi tabel 3 hasil Uji Regresi Linear Berganda dapat dibuat estimasi regresi berganda sebagai berikut :

$$KILK = 13.011 + 0,107 X1 + 0,348 X2 + 0,090 X3$$

Analisi Koefisien Determinasi ( Uji statistik R<sup>2</sup>)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.655 <sup>a</sup>	.430	.366	2.654

a. Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance (X3), SAKTI (X1), Kompetensi SDM (X2)  
b. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Data diolah (2023)

Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,366 atau 36,6%, dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi SAKTI (X1), variabel Kompetensi SDM (X2), dan variabel Penerapan Good Governance (X3) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 36,6% terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y). Sisanya, sekitar 63,4%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak termasuk dalam variabel-variabel yang telah diamati dalam penelitian. Oleh karena itu, faktor-faktor tambahan ini dapat menjadi titik fokus untuk penelitian selanjutnya atau menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	143.241	3	47.747	6.779	.001 <sup>b</sup>

Residual	190.179	27	7.044
Total	333.419	30	

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance (X3), SAKTI (X1), Kompetensi SDM (X2)

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 5, ditemukan bahwa nilai Fhitung sebesar 6,779, yang lebih besar daripada nilai Ftabel sebesar 2,96. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel implementasi SAKTI (X1), variabel Kompetensi SDM (X2), dan Penerapan Good Governance (X3) terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan (Y).

Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa hipotesis alternatif (H5) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Secara simultan dan positif, variabel kualitas laporan keuangan pemerintah (Y) di satuan kerja KPPN Meulaboh dipengaruhi oleh variabel implementasi SAKTI (X1), Kompetensi SDM (X2), dan Penerapan Good Governance (X3).

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	13.011	5.801		2.243	.033			
SAKTI (X1)	.107	.104	.164	1.035	.310	.842	1.188	
1 Kompetensi SDM (X2)	.348	.123	.523	2.826	.009	.616	1.624	
Penerapan Good Governance (X3)	.090	.191	.082	.470	.642	.692	1.445	

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Sumber: Data diolah (2023)

1. Nilai t sebesar 1,035 untuk variabel penerapan SAKTI (X1) berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,703 dengan membandingkan keduanya. Hasilnya, kita dapat menerima hipotesis nol (H0) dan menolak hipotesis alternatif (H1). Hal ini membuat kami yakin, setidaknya sebagian, bahwa X1, variabel yang mewakili

penerapan SAKTI, tidak ada hubungannya dengan Y, variabel yang mewakili kualitas laporan keuangan.

2. Ditentukan nilai t hitung sebesar 2,826 untuk variabel Kompetensi SDM (X2) berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,703. Dengan demikian, hipotesis memungkinkan kita untuk menolak hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis alternatif (H2). Artinya X2 variabel Kompetensi SDM berpengaruh secara parsial terhadap Y variabel kualitas laporan keuangan.
3. Nilai t-hitung pada variabel Penerapan Good Governance (X3) sebesar 0,470 berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Perlu diingat bahwa nilai t-tabel adalah 1,703, dan nilai ini lebih rendah. Secara teori, hasil ini dapat kita gunakan untuk menolak hipotesis alternatif (H3) dan menerima hipotesis nol (H0). Dengan demikian X3 yang merupakan variabel praktik tata kelola yang baik secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y yang merupakan variabel kualitas laporan keuangan.

#### Pembahasan

#### Pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ( SAKTI ) Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengujian menunjukkan bahwa variabel SAKTI yang merupakan singkatan dari Sistem Penerapan Keuangan Tingkat Instansi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan." Nilai t sebesar 1,035 dan tingkat signifikansi 0,842 ditentukan oleh analisis regresi linier berganda. Nilai t tabel lebih kecil dari 1,703 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05.

Secara umum, temuan studi ini bertentangan dengan alasan di balik Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa sistem tersebut harus ada untuk memantau pelaksanaan proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Modo, S. M. (2016) menemukan bahwa kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dipengaruhi secara negatif oleh variabel Penggunaan Teknologi Informasi, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Modo lebih lanjut menyatakan bahwa kecilnya hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: penggunaan TI di bawah standar, kurangnya pengetahuan tentang perlunya memperbarui aplikasi TI agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) versi terbaru. ), dan mahalnnya harga yang terkait dengan penerapan TI. Akibatnya, investasi di bidang TI menjadi sia-sia,

menghabiskan lebih banyak uang, dan melemahkan kemampuan untuk memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan  
Variabel Kompetensi SDM diketahui berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Hasil analisis regresi linier berganda menguatkan hal tersebut, menunjukkan nilai t sebesar 2,826 dan nilai sig sebesar 0,009. Tidak hanya itu, nilai t-tabel lebih besar dari 1,703 (2,826), dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,009).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik SDM berkualitas tinggi secara signifikan mempengaruhi keandalan data akuntansi pelaporan keuangan. Untuk mengelola keuangan secara efektif, profesional SDM harus kompeten di bidang akuntansi dan keuangan serta memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai untuk peran mereka.

Pentingnya sumber daya pemerintah yang kompeten untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif disoroti oleh Sukmaningrum (2017). Landasan pendidikan yang kuat di bidang akuntansi, pengembangan profesional berkelanjutan, dan pengalaman kerja yang relevan di industri keuangan merupakan komponen penting dari sumber daya ini. Semuanya harus siap agar peluncuran sistem akuntansi dapat berjalan tanpa hambatan.

Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan berbanding lurus dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Penelitian Zubaidi (2019), Latifah (2017), dan Zai (2020) semuanya mendukung penemuan ini. Penelitian mereka menemukan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Kompetensi SDM.

Menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Analisis statistik menunjukkan bahwa variabel Penerapan Good Governance tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap keandalan laporan keuangan. Nilai t sebesar 0,470 dan nilai sig sebesar 0,642 dari analisis regresi linier berganda menunjukkan hal ini. Selain itu terdapat nilai signifikan sebesar  $0,642 > 0,05$  dan nilai t tabel sebesar  $0,470 < 1,703$ .

Tergantung pada keadaan, berbagai orang mungkin menggunakan definisi "Good Governance" yang berbeda-beda (Batubara, 2006). Dengan berpegang pada prinsip Good Governance, berbagai lembaga dan satuan kerja lembaga KPPN Meulaboh dapat

meningkatkan pengelolannya yang dipandang sebagai layanan publik yang membantu mendanai operasional masyarakat. Keberhasilan penerapan Good Governance dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga atau instansi mempunyai kemampuan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintahan-pemerintahan ini bertanggung jawab kepada pemerintah federal dan masyarakat, namun mereka juga bebas mengatur wilayah mereka sendiri. Responden menyatakan bahwa satuan kerja KPPN Meulaboh tidak terlibat dalam proses penyusunan anggaran, memberikan pendapat dan kritik, padahal penerapan Good Governance di lembaga atau instansinya dinilai positif.

Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan Desmaria Puji (2017) yang tidak menemukan bukti bahwa Good Governance meningkatkan keakuratan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Hastuti (2016) tidak menemukan korelasi antara Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan temuan kami.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang sama, masih terdapat ruang untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam rangka penerapan Good Governance. Tujuannya adalah untuk mencapai dampak yang lebih positif dan signifikan.

## SIMPULAN

Secara parsial variabel SAKTI dan Penerapan Good Governance tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada satuan kerja atau lembaga KPPN Meulaboh, sesuai hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya. Namun keakuratan data laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM. Selanjutnya, hasil pengujian secara bersamaan menunjukkan bahwa SAKTI, Kompetensi SDM, dan Penerapan Good Governance semuanya berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga atau satuan kerja yang membentuk KPPN Meulaboh. Penelitian ini tidak memperhitungkan sisa uji koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 63,4%. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat, penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel tambahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini akan membantu memperluas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada instansi terkait berdasarkan data yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Kompetensi SDM: Instansi dan instansi yang terkait dengan satuan kerja

KPPN Meulaboh, serta pihak terkait lainnya, sebaiknya memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM. Terdapat ruang untuk perbaikan dalam pendidikan akuntansi dan keuangan, pelatihan, dan program pengembangan keterampilan. Penting untuk menilai seberapa baik Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Badan (SAKTI) berjalan sehingga dapat ditingkatkan. Jika ditemukan kelemahan atau hambatan, pihak terkait dapat mempertimbangkan pembaruan, perbaikan, atau peningkatan fitur-fitur tertentu untuk meningkatkan efektivitasnya. (3) Perbaikan Implementasi Good Governance: Implementasi Good Governance perlu diperhatikan lebih lanjut. Pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbaikan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diimplementasikan dengan lebih efektif. (4) Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait: Melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses evaluasi dan perbaikan dapat menjadi langkah yang produktif. Keterlibatan stakeholders seperti pegawai, manajemen, dan pihak terkait lainnya dapat memberikan wawasan dan masukan berharga terkait perbaikan yang diperlukan. (5) Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala: Penting untuk menjadwalkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan semua rekomendasi dan perbaikan yang diusulkan. Hal ini membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berdampak positif dan berkelanjutan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan. *Jurnal Informatika*, 1(2), 32-55
- Defitri, S. Y. (2016, October). Pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. In *National Conference of Applied Science, Engineering, Business and Information technology, Politeknik Negeri Padang*.
- Dirjen Perbendaharaan RI. (2022). <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pacitan/id/sakti/modulkomitmen.html>.
- Batubara, A. H. (2006). Konsep *Good Governance* dalam konsep otonomi daerah.
- Ihsanti, E. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota). Artikel. Universitas Negeri Padang. Padang:

- Ikatan Akuntan Indonesia (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 3 Mengenai Laporan Keuangan Interim. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan IAI
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan *Good Governance*. *Economics Bosowa*, 4(3), 14-28.
- Karianga, H. (2017). Hakikat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif *Good Governance*. *JL Pol'y & Globalisasi*, 65, 90.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 7(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rosidi, A., & Fajriani, R. A. (2013). *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Andi.
- Sabrina, T., & Zuhri, Z. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Di PTN Pariwisata Pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif). *CIVITAS: Jurnal Studi Manajemen*, 5(1),10-24.
- Syahrul Fuady Politeknik Keuangan Negara STAN, M., & Politeknik Keuangan Negara STAN, I. (2017). Strategi Automasi Manajemen Keuangan Publik Di Indonesia (Vol. 1).
- Sudiarti, Ni Wayan. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Locus of Control Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*.
- Sukmaningrum, T. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang:
- Wijayanti, M. L. A. (2021). Implementasi Inovasi Telunjuk Sakti dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- Yadiati, & Winwin. 2017. Kualitas Pelaporan Keuangan. Jakarta:Kencana Prenada media Group
- Zeyn, E. (2018). Pengaruh kualitas audit internal terhadap kualitas akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah. *Jurnal Penelitian Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 4(2), 74-82.